



KECAMATAN
PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
TAHUN 2024



BAB II

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kecamatan Pelaihari merupakan salah satu Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai luas wilayah 378,95 Km² dan terbagi dalam 5 Kelurahan, 15 desa, 77 RW dan 278 RT.

LETAK GEOGRAFIS

Kecamatan Pelaihari secara geografis terletak pada 114,642° – 114,872° Bujur Timur dan 3,64062°-3,99204° Lintang Selatan, yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Takisung.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebanyak 78.001 jiwa. Penduduk paling banyak di Kecamatan Pelaihari terdapat di Kelurahan Pelaihari dengan jumlah penduduk sebesar 11.139 jiwa dan paling sedikit di desa Guntung Besar sejumlah 614 jiwa. Jika dilihat kepadatan penduduknya, Kelurahan Angsau merupakan kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.233 jiwa per km². Sementara itu di desa Tungkaran kepadatan penduduknya paling sedikit yaitu 29 jiwa per km². Rasio jenis kelamin penduduk di kecamatan Pelaihari secara umum yaitu 102 yang artinya terdapat sebanyak 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Kelurahan Sarang Halang merupakan satu-satunya kelurahan yang rasio jenis kelaminnya kurang dari 100 yaitu 99 yang berarti terdapat sebanyak 99 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Pelaihari saat ini dipimpin oleh Agus Setiyo, S.STP, M.M selaku Camat Pelaihari yang sudah menjabat sejak tahun 2023. Dalam menjalankan tugasnya, camat pelaihari dibantu oleh Sekretaris, Kasi/Kasubbag serta Lurah.

2.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan Pelaihari selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kecamatan Pelaihari mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:



1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer,



Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

2.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMRINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan-LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan-LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB V	Penutup



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 17.525.282.356,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

APBD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp18.381.085.637,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Realisasi APBD Kecamatan Pelaihari untuk Tahun Anggaran 2023 untuk belanja sebesar Rp. 16.689.300.001,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Satu Rupiah).

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2023 mencapai 90,80 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana Kecamatan Pelaihari dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap aplikasi SIPD terbaru.



BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

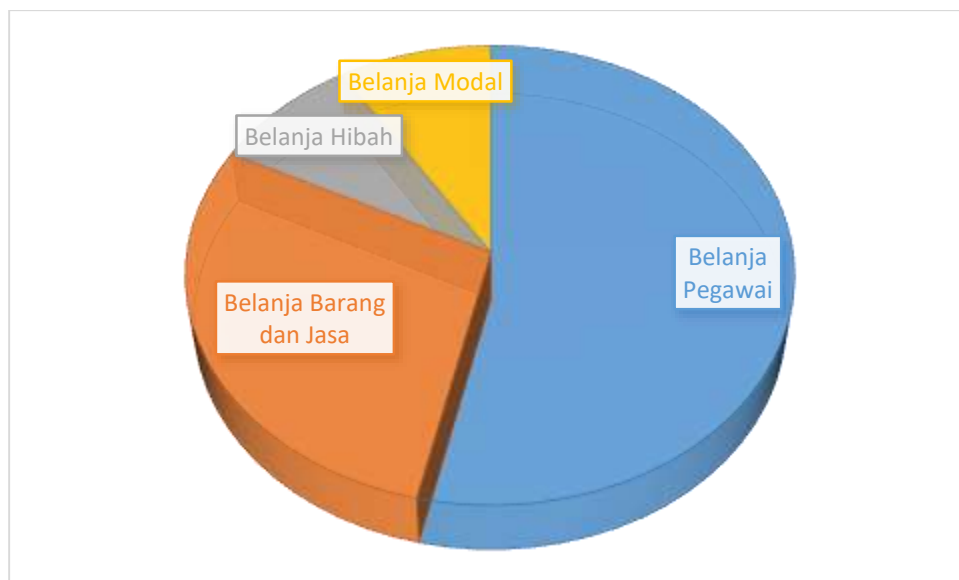
4.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1.1 BELANJA OPERASI

Belanja operasi untuk tahun anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.764.662.647,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.359.013.541,00, Belanja Hibah sebesar Rp. 1.562.645.000,00 dan Belanja Modal sebesar 1.694.764.449,00.

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.726.695.332,00 atau sebesar 19,53% dari tahun sebelumnya.

Grafik 1. Realisasi Belanja Operasi 2023



4.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
9.764.662.647,00	8.937.102.114,00	8.812.276.425,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 8.937.102.114,00 dan Rp 8.812.276.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.202.545.482,00	4.934.447.192,00	94,85	4.670.587.533,00	5,65



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.562.117.165,00	4.002.654.922,00	87,74	4.141.688.892,00	(3,36)
	Jumlah	9.764.662.647,00	8.937.102.114,00	91,52	8.812.276.425,00	1,24

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 124.825.689,00 atau sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
5.359.013.541,00	4.833.579.248,00	3.381.001.583,00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 4.833.579.248,00 dan Rp3.381.001.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.324.818.382,00	1.130.222.437,00	85,31	1.035.760.555,00	9,12
2	Belanja Jasa Kantor	2.565.220.635,00	2.458.645.371,00	95,85	1.880.110.134,00	30,78
3	Belanja Premi Asuransi	48.592.836,00	15.434.185,00	31,76	14.028.046,00	10,02
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	31.611.410,00	16.721.000,00	52,90	9.868.500,00	69,43
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.850.600,00	1.260.600,00	68,12	7.590.000,00	(83,40)
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	100,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100)
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.550.000,00	161.475.498,00	96,37	120.857.867,00	33,60777
9	Belanja Perjalanan Dinas	1.190.669.678,00	1.028.820.157,00	86,41	297.786.481,00	245,4892
10	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.359.013.541	4.833.579.248,00	90,20	3.381.001.583,00	42,97

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.452.577.665,00 atau sebesar 42,97% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.1.1.1.3 BELANJA HIBAH

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>1.562.645.000,00</u>	<u>1.427.754.000,00</u>	<u>432.380.000,00</u>

Jumlah realisasi Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 1.427.754.000,00 dan Rp 432.380.000,00 terdiri atas:

Tabel 3. Belanja Hibah

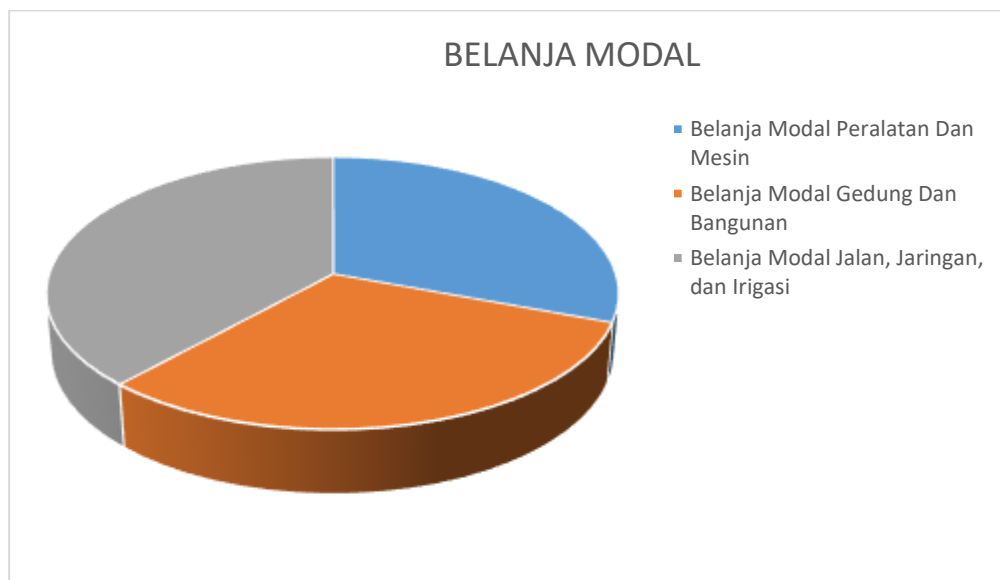
No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.562.645.000,00	1.427.754.000,00	91,37	432.380.000,00	230,20
	Jumlah	1.562.645.000,00	1.427.754.000,00	91,37	432.380.000,00	230,20

Realisasi Belanja Hibah Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 995.374.000,00 atau sebesar 230% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 456.680.008,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 463.268.978,00 dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 570.915.653,00.

Grafik 2. Realisasi Belanja Modal 2023



4.1.1.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>520.857.681,00</u>	<u>456.680.008,00</u>	<u>132.719.408,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp456.680.008,00 dan Rp 132.719.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Alat-alat Bantu	0.00	0.00	0.00	4.000.000,00	(100,00)
2	Pengadaan Alat Ukur	8.100.780,00	7.298.000,00	90,09	9.500.000,00	(23,17)
3	Pengadaan Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	12.335.908,00	(100,00)
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga	346.489.522,00	297.971.750,00	86,00	8.238.500,00	3516,82
5	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.837.982,00	12.625.000,00	91,23	0,00	100,00
6	Pengadaan Alat Studio	750.000,00	750.000,00	100,00	10.125.000,00	(92,59)
7	Pengadaan Alat Kedokteran	6.660.000,00	6.000.000,00	90,09	0,00	100,00
8	Pengadaan Komputer Unit	123.086.302,00	112.498.758,00	91,40	73.300.000,00	53,48
9	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.933.095	19.536.500,00	89,07	6.520.000,00	199,64
10	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	8.700.000,00	(100)
	Jumlah	520.857.681	456.680.008,00	87,68	132.719.408,00	244,09

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 323.960.600,00 atau sebesar 244,09% dari tahun sebelumnya.

4.1.1.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
512.818.907,00	463.268.978,00	396.693.225,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 463.268.978,00 dan Rp 396.693.225,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	512.818.907,00	463.268.978,00	90,34	396.693.225,00	16,78
	Jumlah	512.818.907,00	463.268.978,00	90,34	396.693.225,00	16,78

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 66.575.753,00 atau sebesar 16,78% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.1.1.2.3 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
661.087.861,00	570.915.653,00	807.534.028,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp 570.915.653,00 dan Rp 807.534.028,00 terdiri atas:

Tabel 6 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Jalan	371.156.043	333.117.859,00	89,75	454.950.812,00	(26,78)
2	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	106.316.216,00	(100,00)
3	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	68.072.000,00	(100,00)
5	Pengadaan Bangunan Air Kotor	289.931.818,00	237.797.794,00	82,02	0,00	100,00
6	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	178.195.000,00	(100,00)
	Jumlah	661.087.861	570.915.653,00	86,36	807.534.028,00	(29,30)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 236.618.375,00 atau sebesar 29.30% dari tahun sebelumnya.

4.1.2 NERACA

4.1.2.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

4.1.2.2 PERSEDIAAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.781.662,80	2.530.500,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 4.781.662,80 dan Rp 2.530.500,00. Saldo Persediaan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.251.162,80 atau sebesar 88,96% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.1.2.3 ASET TETAP

31 Desember 2023
(Rp)

26.856.169.448,86

31 Desember 2022
(Rp)

21.404.795.371,86

Saldo Aset Tetap Kecamatan Pelaihari per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 26.856.169.448,86 dan Rp 21.404.795.371,86 terdiri atas:

Tabel 7 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.	Tanah	3.761.920.212,00	3.798.800.212,00	(36.880.000 ,00)
2.	Peralatan dan Mesin	4.687.997.301,86	4.315.316.691,86	372.680.610 ,00
3.	Gedung dan Bangunan	16.441.224.321,00	16.327.876.143,00	113.348.178,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.965.027.614,00	1.404.051.027,00	560.976.587 ,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.856.169.448,86	25.846.044.073,86	1.010.125.375,00

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

4.1.2.3.1 TANAH

31 Desember 2023
(Rp)
3.761.920.212,00

31 Desember 2022
(Rp)
3.798.800.212,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.761.920.212,00 dan Rp3.798.800.212,00. Realisasi Tanah Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp36.880.000 ,00 atau sebesar 0,97% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

4.1.2.3.2 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2023
(Rp)
4.771.996.699,86

31 Desember 2022
(Rp)
4.315.316.691,86

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.771.996.699,86 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.315.316.691,86. Realisasi peralatan dan mesin Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 456.680.008,00 atau sebesar 10,58%.

4.1.2.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2023
(Rp)
16.791.145.121,00

31 Desember 2022
(Rp)
16.327.876.143,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar dan 2022 sebesar Rp 16.791.145.121,00 dan Rp 16.327.876.143 ,00. Realisasi Bangunan dan Gedung Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 463.268.978,00,00 atau sebesar 2,84% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.756.760.386,00	1.404.051.027,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 1.756.760.386,00 dan Rp 1.404.051.027,00. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 352.709.359,00,00 atau sebesar 25,12% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.3.5 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
188.842.229,00	0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 188.842.229,00 dan Rp 0,00. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 188.842.229,00,00 atau sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.3.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.441.248.702,00	4.441.248.702,00

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Kecamatan Pelaihari sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.441.248.702,00 dan 4.441.248.702,00.

4.1.2.4 EKUITAS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
22.684.593.379,86	22.721.656.223,86

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 22.684.593.379,86 dan Rp 22.721.656.223,86. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 21.404.158.580,86 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2023	21.404.158.580,86
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00
Surplus/defisit Operasional	(15.205.202.908,00)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	16.485.637.707,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023

22.721.656.223,86

4.1.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.1.3.1 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp 15.190.658.908,20 dan Rp 12.626.705.910,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pegawai	8.937.102.114,00	8.812.276.425,00	124.825.689,00	1,42
2	Persediaan	1.127.971.274,20	1.041.474.255,00	86.497.019,20	8,31
3	Jasa	2.509.893.865,00	1.926.930.881,00	582.962.984,00	30,25
4	Pemeliharaan	161.475.498,00	120.857.867,00	40.617.631,00	33,61
5	Perjalanan Dinas	1.026.462.157,00	297.786.482,00	728.675.675,00	244,70
6	Barang & BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hibah	1.427.754.000,00	427.380.000,00	1.000.374.000,00	234,07
	Jumlah	15.190.658.908,20	12.626.705.910,00	2.563.952.998,20	20,31

Realisasi Beban Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.563.952.998,20 atau sebesar 20,31% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

4.1.3.1.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 8.937.102.114,00 dan Rp 8.812.276.425,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.711.579.598,00	3.620.986.575	90.593.023	2,50
2	Beban Tunjangan Keluarga	214.487.238,00	214.317.879	169.359	0,08
3	Beban Tunjangan Jabatan	260.875.000,00	264.045.000	(3.170.000)	(1,20)
4	Beban Tunjangan Fungsional	4.800.000,00	0	4.800.000	100,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	94.225.000,00	89.510.000	4.715.000	5,27
6	Beban Tunjangan Beras	155.920.260,00	154.254.600	1.665.660	1,08
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	173.453.405,00	6.009.868	167.443.537	2.786,14
8	Beban Pembulatan Gaji	53.530,00	49.897	3.633	7,28
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	288.653.897,00	291.567.397	(2.913.500)	(1,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.599.795,00	7.475.938	123.857	1,66
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	22.799.469,00	22.370.379	429.090	1,92
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.446.790.276,00	4.141.688.892	(694.898.616)	(16,78)
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	555.864.646,00	0	555.864.646	100,00
	Jumlah	8.937.102.114	8.812.276.425	124.825.689	1,42

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 124.825.689,00 atau sebesar 1,42% dari tahun sebelumnya.

4.1.3.1.2 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.127.889.037,00 dan Rp 1.041.474.255,00. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut::

Tabel 10 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	116.554.620	131.985.175	(15.430.555)	(11,69)
2	Kertas dan Cover	47.408.602	38.094.700	9.313.902	24,45
3	Perabot Kantor	32.048.789	42.714.500	(10.665.711)	(24,97)
4	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, <i>Battery</i> Kering)	14.567.500	15.759.000	(1.191.500)	(7,56)
5	Suvenir/Cendera Mata	3.655.000	1.453.300	2.201.700	151,50
6	Benda Pos	9.690.000	7.650.000	2.040.000	26,67
7	Bahan Bakar Minyak/Gas				
8	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77.599.851	34.532.850	43.067.001	124,71
9	Pengisian Isi Tabung Gas	1.125.000	0	1.125.000	100,00
10	Barang Cetakan	1.195.000	0	1.195.000	100,00
11	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.705.760	0	2.705.760	100,00
12	Obat-Obatan Lainnya	7.500.000	0	7.500.000	100,00
13	Makanan dan Minuman Rapat	155.700.000	92.655.000	63.045.000	68,04
14	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	750.000	0	750.000	100,00
15	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	347.325.000	330.930.000	16.395.000	4,95
16	Bahan Komputer	34.896.340	34.136.000	760.340	2,23



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
17	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	172.290.500	17.186.500	155.104.000	902,48
18	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.923.575	274.997.230	(231.073.655)	(84,03)
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	10.000.000	1.380.000	8.620.000	624,64
20	Pakaian Batik Tradisional	48.953.500	18.000.000	30.953.500	171,96
	Jumlah	1.127.889.037	1.041.474.255	86.414.782	8,30

Realisasi Beban Persediaan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 86.414.782,00 atau sebesar 8,3% dari tahun sebelumnya.

4.1.3.1.3 BEBAN JASA

Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.513.061.156,00 dan Rp 1.926.930.881,00. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	611.284	251.114	360.170	143,43
2	Beban Jasa air	7.119.500	7.338.100	(218.600)	(2,98)
3	Beban Jasa listrik	76.475.607	53.284.974	23.190.633	43,52
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	2.800.000	7.290.000	(4.490.000)	(61,59)
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	25.523.980	20.462.354	5.061.626	24,74
6	Beban Jasa Transaksi Keuangan	0	902.663	(902.663)	(100,00)
7	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	9.750.000	11.000.000	(1.250.000)	(11,36)
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.000.000	0	2.000.000	100,00
9	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	182.400.000	(182.400.000)	(100,00)
10	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.058.400.000	0	1.058.400.000	100,00
11	Beban Jasa Tenaga Administrasi	592.800.000	296.400.000	296.400.000	100,00
12	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum				
13	Beban Jasa Tenaga ahli/narasumber/instruktur	534.550.000	352.850.000	181.700.000	51,49
14	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	45.600.000	72.000.000	(26.400.000)	(36,67)
15	Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000	91.200.000	(68.400.000)	(75,00)
16	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000	0	5.000.000	100,00
17	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.350.000	125.550.000	(109.200.000)	(86,98)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
18	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.465.000	23.574.000	30.891.000	131,04
19	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0	628.800.000	(628.800.000)	(100,00)
20	Beban Honorarium Rohaniwan	4.400.000	3.150.000	1.250.000	39,68
21	Beban Registrasi/Keanggotaan	0	3.991.130	(3.991.130)	(100,00)
22	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.095.916	11.049.408	1.046.508	9,47
23	Beban Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.483.741	1.323.828	159.913	12,08
24	Beban Premi Asuransi Jaminan Kematian	1.854.528	1.654.810	199.718	12,07
25	Beban Sewa Bangunan Terbuka	1.260.600	7.590.000	(6.329.400)	(83,39)
26	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.050.000	5.000.000	(950.000)	(19,00)
27	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	800.000	0	800.000	100,00
28	Beban Sewa Mebel	4.747.200	2.168.500	2.578.700	118,92
29	Beban Sewa Alat Pendingin	0	700.000	(700.000)	(100,00)
30	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0	2.000.000	(2.000.000)	(100,00)
31	Beban Sewa Peralatan/Perlengkapan lain-lain	7.123.800	0	7.123.800	100,00
32	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	15.000.000	(15.000.000)	(100,00)
33	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.000.000	0	21.000.000	100,00
	Jumlah	2.513.061.156	1.926.930.881	586.130.275	30,42

Realisasi Beban Jasa Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 586.130.275,00 atau sebesar 30,41% dari tahun sebelumnya.

4.1.3.1.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 161.475.498,00 dan Rp 120.857.867,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.475.498	120.857.867	40.617.631	33,61
	Jumlah	161.475.498	120.857.867	40.617.631	33,61

Realisasi Beban Pemeliharaan Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.617.631,00 atau sebesar 33,61% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

4.1.3.1.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.028.820.157,00 dan Rp 297.786.482,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.275.000	70.950.001	13.324.999	18,78
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	944.545.157	226.836.481	717.708.676	316,40
	Jumlah	1.028.820.157	297.786.482	731.033.675	245,49

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 731.033.675,00 atau sebesar 245,49% dari tahun sebelumnya.

4.1.3.1.6 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.427.754.000,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 427.380.000,00 Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	427.380.000	(427.380.000)	(100,00)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	499.314.000	0	499.314.000	100,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	928.440.000	0	928.440.000	100,00
	Jumlah	1.427.754.000	427.380.000	1.000.374.000	234,07

Realisasi Beban Hibah Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.374.000,00 atau sebesar 234,07% dari tahun sebelumnya.



4.1.3.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2023 sebesar Rp 0,00 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.977.000,00.

4.1.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 294.628.509,00. Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Beban Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	100.450.509,00	(100.450.509,00)	(100,00)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	194.178.000,00	(194.178.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	294.628.509,00	(294.628.509,00)	(100,00)

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kecamatan Pelaihari pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 294.628.509,00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya.

4.1.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 22.900.441.673,66 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2023 sebesar Rp23.798.179.272,86 dikurang Defisit LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 15.193.016.908,20 ditambah Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 14.295.279.309,00.

4.1.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 23.798.179.272,86. Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022.

4.1.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2023

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 15.193.016.908,20 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2023. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

4.1.4.3 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp 8.255.961.100,00. Rincian untuk masing masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas – Lainnya	0,00	8.255.961.100,00
	Jumlah Koreksi Ekuitas	0,00	8.255.961.100,00



BAB IV

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2023. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dari belanja dianggarkan sebesar Rp 18.381.085.637,00 yang terealisasi sebesar Rp 16.689.300.001,00 atau 90,80%. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2023 ini, Kecamatan Pelaihari bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dari segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Kecamatan Pelaihari akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LK SKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

CAMAT PELAIHARI

(AGUS SETIYO, S.STP, M.Si)

NIP. 19850808 200412 1 001



LAMPIRAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Data Umum	1
Letak Geografis	1
Penduduk dan Ketenagakerjaan	1
Struktur Organisasi.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah daerah.....	5
2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan..	5
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	6
3.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	6
3.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6
3.1.2 Neraca.....	10
3.1.3 Laporan Operasional	13
3.1.4 Penjelasan Atas Laporan perubahan Ekuitas.....	18
BAB IV PENUTUP	19
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rincian Belanja Pegawai	6
Tabel 2. Rincian Belanja Barang dan Jasa	7
Tabel 3. Belanja Hibah	8
Tabel 4. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9
Tabel 5. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9
Tabel 6. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10
Tabel 7. Rincian Saldo Aset Tetap	11
Tabel 8. Rincian Beban	13
Tabel 9. Rincian Beban Pegawai	13
Tabel 10. Rincian Beban Persediaan	14
Tabel 11. Rincian Beban Jasa.....	15
Tabel 12. Rincian Beban Pemeliharaan.....	16
Tabel 13. Rincian Beban Perjalanan Dinas	17
Tabel 14. Rincian Beban Hibah.....	17
Tabel 15. Rincian Beban Defisit Non Operasional	18
Tabel 16. Koreksi Ekuitas	18



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Realisasi Belanja Operasi 2023	6
Grafik 2. Realisasi Belanja Modal 2023	8



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Neraca SKPD
- Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Lampiran 3. Laporan Operasional (LO)
- Lampiran 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Lampiran 5. Rekapitulasi Barang ke Neraca Tahun 2023
- Lampiran 6. Rekapitulasi Barang ke Neraca Tahun 2022